



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR .2 . TAHUN 2024

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

~1

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
dan  
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;

- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023, meliputi:

a. pendapatan	Rp.	1.926.042.328.778,78
b. belanja	Rp.	1.967.931.040.605,42
surplus/(defisit)	Rp.	(41.888.711.826,64)
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp.	92.512.086.266,84
- pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	92.512.086.266,84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	50.623.374.440,20

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.62.978.849.791,20 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.989.021.178.570,00
  - 2. realisasi Rp. 1.926.042.328.778,78
  - selisih lebih/(kurang) Rp. 62.978.849.791,20
- b. selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp.113.602.224.232,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.081.533.264.837,00
  - 2. realisasi Rp. 1.967.931.040.605,42
  - selisih lebih/(kurang) Rp. 113.602.224.232,00
- c. selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(50.623.374.440,36) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. (92.512.086.267,00)
  - 2. realisasi Rp. (41.888.711.826,64)
  - selisih lebih/(kurang) Rp. (50.623.374.440,36)
- d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,16 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 92.512.086.267,00
  - 2. realisasi Rp. 92.512.086.266,84
  - selisih lebih/(kurang) Rp. 0,16

e. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,00
2. realisasi	Rp.	0,00
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

f. selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.0,16 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	92.512.086.267,00
2. realisasi	Rp.	92.512.086.266,84
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,16

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023, meliputi:

a. saldo anggaran lebih awal penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp.	92.512.086.266,84
b. sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) koreksi kesalahan	Rp.	50.623.374.440,20 0,00
c. saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2023	Rp.	50.623.374.440,20

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023, meliputi:

a. jumlah aset	Rp.	4.379.742.093.668,59
b. jumlah kewajiban	Rp.	9.834.805.801,49
c. jumlah ekuitas	Rp.	4.369.907.287.867,10

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2023, meliputi:

a. pendapatan	Rp.	1.845.810.193.448,41
b. beban surplus/(defisit) dari operasi	Rp.	1.761.919.402.721,86 83.890.790.726,55
c. surplus/(defisit) dari kegiatan non operasi	Rp.	(3.866.108.738,43)
d. pos luar biasa surplus/(defisit) LO	Rp.	0,00 80.024.681.988,12

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, meliputi:

a. saldo awal kas per 1 Januari 2023	Rp.	92.512.086.266,84
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	449.546.982.063,22
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(491.435.693.889,86)
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp.	(97.600,00)
f. saldo akhir kas per 31 Desember 2023	Rp.	50.623.383.440,20

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2023, meliputi:

a. ekuitas awal	Rp.	4.289.846.054.279,37
b. surplus/(defisit) laporan operasional	Rp.	80.024.681.988,12
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan	Rp.	36.551.599,61
d. ekuitas akhir	Rp.	4.369.907.287.867,10

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri:

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas.
  - Lampiran 1.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
  - Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.

- 2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 3) Lampiran III : Laporan Operasional.
- 4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- 5) Lampiran V : Neraca.
- 6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- 7) Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
- 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
- 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.
- 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap.
- 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.
- 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
- 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
- 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek.
- 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang.
- 19) Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Mlik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas.
  - Lampiran XX.1 : Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
  - Lampiran XX.2 : Iktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 29 AGUSTUS 2024

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 29 AGUSTUS 2024

~~SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,~~

ALI SADIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (3-48/2024)